BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sekilas Sejarah Timor Leste

Timor Timur merupakan sebuah wilayah bekas koloni portugis yang dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi yang pernah menjadi bagian Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai 19 Oktober 1999. Kala itu provinsi ini merupakan provinsi Indonesia yang ke-27. Timor Timur dianeksasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur pulau Timor, pulau Kambing atau Atauro, pulau Jaco dan sebuah eksklave di Timor Barat yang dikelilingi oleh provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setelah merdeka, namanya berubah menjadi Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur. Negara ini adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.

Timor Leste dulu adalah salah satu provinsi di Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor Leste" sebagai nama resmi negara mereka.

Berikut adalah tabel sejarah Timor Leste dari abad 16 hingga 21 dihalaman selanjutnya :

Tabel 3.1 Sejarah Timor Leste abad 16 - 21

No	Waktu	Keterangan
1	Abad ke-16	Kedatangan kaum Portugis
2	1902	Pembagian Timor antara kaum Portugis dan Belanda secara definitif
3	1975	Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang dilanda Revolusi Anyelir
4	1976	Bergabung dengan Indonesia, menjadi Provinsi Timor Timur
5	1976 - 1980	Perang saudara; konon sekitar 100.000 - 250.000 orang tewas
6	1991	Insiden Santa Cruz
7	1999	• Referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan presiden B. J. Habibie • Kerusuhan besar-besaran antara pro- dan anti-kemerdekaan dan pengungsian warga Timor Timur
8	2002	Terbentuknya negara Timor Leste
9	2006	Sepertiga mantan tentara nasional Timor Leste memberontak menuntut keadilan; pecah konflik antara pihak polisi yang mendukung pemerintah dengan pihak militer

3.1.1 Politik

Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan.

Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut *Parlamento Nacional*. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal.

Angkatan Bersenjata Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL (*Polícia Nacional Timor-Leste*).

3.1.2 Kabupaten (distrik)

Timor Leste secara administratif dibagi menjadi 13 distrik:

- Aileu
- Ainaro
- Baucau
- Bobonaro (Maliana)
- Cova-Lima (Suai)
- Dili
- Ermera
- Lautem (Lospalos)
- Liquica
- Manatuto
- Manufahi (Same)
- Oecussi-Ambeno (Pante Makasar)
- Viqueque (Cabira-Oan)

3.1.3 Ekonomi

Timor Leste mengharapkan bisa mengeksploitasikan minyak bumi di Celah Timor (*Timor Gap*), namun sepertinya sulit untuk mendapatkan pendapatan devisa yang besar di Celah Timor karena Australia telah mengiming-imingi Timor Leste dengan pengelolaanya dan Australia mendapatkan hasil eksploitasinya sebesar 80% dan sisanya diberikan ke Timor Leste. Australia juga telah menghalang-halangi Timor Leste untuk dapat menguasai Celah Timor secara penuh, dengan cara mengulur-ulur penyelesaian perbatasan kedua negara.

Walaupun telah merdeka, Timor Leste masih sangat tergantung dengan pasokan barang-barang dari Indonesia mulai dari sembako sampai bahan bakar minyak (BBM) terutama melalui provinsi Nusa Tenggara Timur. Australia pernah mencoba menguasai distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari tapi gagal karena terlalu mahal dan kurang dikenal rakyat Timor Leste. Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia.

3.1.4 Demografi

Pada tahun 2005 penduduk **Timor Leste** diperkirakan berjumlah 1.040.880 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Afrika, sebagian kecil keturunan Portugis. Mayoritas penduduk TimorLeste beragama Katolik (93%),diikuti Protestan (3%), Islam (1%) , dan sisanya Buddha, Hindu (1%, masing-masing 0,5%), dan aliran kepercayaan

(2%). Karena mayoritas penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat tiga keuskupan (diosis) yaitu: Diosis Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan pada tanggal 30 Januari 2010 oleh Paus Benediktus XVI.

3.1.5 Bahasa

Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, setelah sejak tahun 1999 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi Timor Leste memiliki 2 bahasa resmi yaitu Bahasa Tetun dan Bahasa Portugis. Selain itu dalam konstitusi disebutkan pula bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja. Dalam praktek keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap.

3.1.6 Timor Leste Menuju ASEAN

Negara baru Timor Leste, yang merupakan koloni Portugis kemudian dianeksasi Indonesia, kini mendapatkan status peninjau (*observer*) dalam ASEAN, setelah menuai protes dari berbagai negara ASEAN yang tidak mendukung masuknya Timor-Leste ke ASEAN, atas dasar rasa hormat kepada Indonesia. Awalnya, Myanmar menentang pemberian status observer kepada Timor-Leste karena dukungan Timor-Leste terhadap pejuang pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi.

Sejak restorasi kemerdekaan Timor-Leste pada Mei 2002, ASEAN telah banyak membantu Timor-Leste. Timor-Leste telah diundang untuk hadir dalam beberapa pertemuan ASEAN. Meskipun begitu, Timor-Leste masih tetap berstatus

peninjau. Mantan Menlu Timor Leste yang sekarang menjadi Presiden, Ramos Horta, pernah menyatakan tidak berminat menjadi anggota ASEAN, karena Timor-Leste dinilai bukan negara Asia (Tenggara), melainkan negara Pasifik atau Australia. Berbeda dengan rekannya Xanana Gusmao yang menyatakan bahwa akan lebih menguntungkan bagi Timor Leste apabila berafiliasi dengan ASEAN dibandingkan dengan bergabung dengan Pacific Islands Forum.

Perkembangan terakhir mengindikasikan bahwa Timor-Leste sangat berminat untuk menjadi anggota ASEAN. Bahkan Pemerintah Timor-Leste melalui Kementerian Luar Negerinya telah menargetkan bahwa Timor-Leste akan menjadi anggota ASEAN pada tahun 2012, hal ini sangat di dukung oleh pemerintah Indonesia juga negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan lain-lain. Selain telah dibukanya Sekretariat Nasional ASEAN di Dili oleh Pemerintah Timor-Leste pada awal bulan Februari 2009 untuk mempersiapkan tahapan-tahapan menjadi keanggotaan ASEAN, juga Menlu Timor-Leste Zacarias da Costa telah mengajukan aplikasi keanggotaan ASEAN secara resmi kepada Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2011.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Indonesia, Minggu, 8 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyonomengemukakan bahwa para kepala pemerintahan/kepala negara ASEAN telah menugaskan para Menteri Luar Negerinya, dalam kapasitas sebagai Dewan Koordinasi ASEAN, untuk mempertimbangkan keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN dan

kemudian memberikan rekomendasi kepada para pemimpin untuk diputuskan pada akhir tahun 2011 (http://internasional.kompas.com/read/2011/05/08/18560276/Akhir.Tahun.Nasib.Timor.Leste.di.ASEAN).

3.2 Gambaran Umum ASEAN

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan sebutan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan diBangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi.

Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November (AseanSec : 2010, diakses pada tanggal 10 Juni 2011).

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:

- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
- Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
- Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
- Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai

- Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
- Kerjasama efektif antara anggota

3.2.1 A*ssosiation South East Asia* (ASEAN)

Sekarang, ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara (kecuali Timor Leste dan Papua Nugini). Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:

- Filipina (negara pendiri)
- Indonesia (negara pendiri)
- Malaysia (negara pendiri)
- Singapura (negara pendiri)
- Thailand (negara pendiri)
- Brunei Darussalam (7 Januari 1984)
- Vietnam (28 Juli 1995)
- Laos (23 Juli 1997)
- Myanmar (23 Juli 1997)
- Kamboja (16 Desember 1998)

3.2.2 Sejarah

ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu

ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).

Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut:

- Mempercepat pertumubuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
- Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
- Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik,ilmu pengetahuan, dan administrasi
- Memelihara kerjasama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada
- Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja.

Meskipun begitu, dua tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 16 Desember 1998 (ASEAN : 2010, www.aseansec.org, diakses pada tanggal 20 Juni 2011).

3.2.3 ARF (ASEAN REGIONAL FORUM)

Dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai forum dalam membahas pemeliharaan kestabilitasan dan keamanan di Asia Pasifik. Forum ini dibuat untuk memperkuat pembangunan rasa saling percaya (*Confidence of Building Measures*) diantara negara-negara peserta, menghindari atau mengurangi rasa saling curiga, dan membuka peluang kerja sama dalam menanggulangi isu-isu yang menjadi tantangan bersama kawasan. Semangat utama pembentukan forum ini mengalami perkembangan pada Pertemuan Tingkat Menteri di Vientiene, Laos pada Juli 2005 silam dari *Confidence Building Measures* menuju *Confidence Building Measures* dan *Preventive Diplomacy* (Pembangunan Rasa Saling Percaya sekaligus Pencegahan konflik dan Eskalasi Konflik dalam Kawasan).

Bidang-bidang kerja samanya meliputi antara lain:

1. *Disaster Relief*

   Membahas masalah penanggulangan secara bersama-sama terhadap akibat bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup.

2. *Security Cooperation*

   Kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan yang membahas masalah stabilitas dan keamanan regional.

3. *Peaceful Settlement Disputes*

Membahas usaha pemecahan masalah dalam berbagai konflik serta minimalisasi potensi-potensi konflik yang mungkin memicu atau menimbulkan konflik regional di Asia Tenggara pada khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya dengan cara-cara damai.

4. *Non-Proliferation and Arm Control*

   Membahas proses penataan secara terarah serta pengendalian terhadap pengembangan, baik dari segi pemilikan maupun produksi berbagai jenis persenjataan konvensional dan strategis termasuk rudal-rudal balistik.

2. *Peace Keeping Operation*

   Menyangkut upaya pemeliharaan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia.

3. *Maritime Security Cooperation*

   Membahas upaya kerjasama dalam masalah, kelautan dan keamanan jalur pelayaran (ARF : 2010, diakses pada tanggal 20 Juni 2011).

3.2.4 ASEAN CHARTER (PIAGAM ASEAN)

ASEAN Charter merupakan sebuah bentuk konstitusi untuk ASEAN. Konstitusi berarti bahwa semua negara yang menjadi anggota ASEAN wajib dan harus mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi tersebut. Sedangkan lingkup aturan main yang ditetapkan di dalam ASEAN Charter tersebut menyangkut hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Termasuk juga kesamaan pandangan bahwa ASEAN merupakan wilayah yang bebas nuklir.

Pada dasarnya ASEAN Charter ini mengarahkan kepada para anggota agar mempunyai satu visi dan misi ke depan untuk memajukan kesejahteraan dan kelanggengan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota ASEAN.

Diratifikasi pada KTT ASEAN ke-13 pada 20 November 2007 di Singapura, ASEAN Charter merupakan "Crowning Achievement" dalam memperingati 40 tahun berdirinya ASEAN yang akan memperkuat semangat kemitraan, solidaritas, dan kesatuan negara-negara anggotanya dalam mewujudkan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community – AC*). ASEAN Charter ini menjadi landasan konstitusional pencapaian tujuan dan pelaksanaan prinsip-prinsip yang dianut bersama untuk pencapaian pembangunan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) ditahun 2015.

ASEAN Charter menjadi landasan hukum kerjasama ASEAN sebagai suatu "*rules-based organization*" setelah 40 tahun berdirinya ASEAN. ASEAN Charter menjadikan ASEAN sebagai subjek hukum (memiliki *legal personality*). ASEAN Charter membuat ASEAN dapat melaksanakan kegiatannya berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah disepakati serta diarahkan pada kepentingan rakyat. ASEAN Charter membuat kerjasama antar negara anggota ASEAN akan berlangsung lebih erat dan diatur dalam kerangka hukum dan kelembagaan yang lebih mengikat.

Antara lain memuat hasrat ASEAN untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan serta mendorong peace-oriented attitudes dan perwujudan kawasan Asia Tenggara yang bebas senjata nuklir; membentuk ASEAN menjadi

pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif dan terintegrasi, dengan memfasilitasi arus perdagangan, investasi, arus modal, pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja yang lebih bebas; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan; dan memperkuat demokrasi, *good governance*, dan perlindungan HAM.

Adapun tujuan utama dari ASEAN Charter yakni menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang memiliki *legal personality* (berlandaskan hukum) dan berorientasi pada kepentingan mastarakat dalam kawasan (ASEAN : 2010, www.aseansec.org, diakses pada tanggal 20 Juni 2011).

3.2.5 ASEAN COMMUNITY (AC) – KOMUNITAS MASYARAKAT ASEAN

Walaupun sebagai *follow up* implementasi ASEAN Charter yang baru diratifikasi 100% pada KTT ASEAN ke-13 pada 20 November 2007 di Singapura, wacana-wacana pembentukan *ASEAN Community* (Komunitas Masyarakat ASEAN) telah tersiarkan jauh sebelumnya di berbagai forum ASEAN. Organisasi Regional yang tadinya hanya diimplementasikan lebih dalam bidang ekonomi dengan landasan sebuah Deklarasi yang tidak memiliki jaustifikasi hukum yang kuat kemudian berlandaskan sebuah Piagam – ASEAN Charter, yang mengikat bagi seluruh anggotanya guna mengimplementasikan Visi ASEAN 2020 dalam wajah *ASEAN Community* (AC).

Atas dasar berbagai pertimbangan, pada KTT ASEAN ke-12, 12 Januari 2007 di Filipina disepakati Sebuah Deklarasi, "*Cebu Declaration on the*

Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015". Kesepakatan yang lebih lanjut dikenal Deklarasi Cebu ini menyepakati perubahan Visi ASEAN 2020 dalam bentuk percepatan waktu implementasi menjadi Visi ASEAN 2015. Visi ASEAN 2015 ialah ***"****ASEAN as a concert of Southeast Asian Nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bounded together in partnership in dynamic development and in a community of caring society****"***

Visi ASEAN 2015 inilah yang kemudian diimplementasikan dalam percepatan perwujudan wajah ASEAN Community (AC) pada tahun 2015 di kawasan Asia Tenggara dengan tiga pilar utama, yakni *ASEAN Economic Community* (AEC), *ASEAN Security Community* (ASC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).

1. *ASEAN Economic Community* (AEC)

KTT ke- 9 ASEAN di Bali tahun 2003 menghasilkan Bali Concord II yang menegaskan bahwa Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC – *Asean Economic Community*) bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai sebuah kawasan yang memiliki daya saing tinggi serta diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang meratadan terintegrasi dalam ekonomi global.

Pembentukan *ASEAN Economic Community* akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Disamping itu,

pembentukan Komunitas Ekonomi Asean juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan standarisasi domestik. *ASEAN Economic Community* ini sendiri telah memiliki *blueprint* dan telah diratifikasi pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007 di Singapura.

2. *ASEAN Security Community* (ASC)

ASEAN Security Community (ASC) merupakan sebuah pilar yang fundamental dari komitmen ASEAN. Pembentukan *ASEAN Security Community (ASC)* akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan akan menjadi modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN.

ASEAN Security Community (ASC) menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui saling keterkaitan antar aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. *ASEAN Security Community (ASC)* memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan konflik secara damai. Hal ini dilakukan antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah- masalah politik-keamanan kawasan seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah- masalah keamanan non- tradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain). Dengan derajat kematangan yang ada, ASEAN diharapkan tidak lagi menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang berdampak pada stabilitas kawasan dengan berlindung pada prinsip- prinsip non- interference.

3. *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC)

Kerjasama di bidang sosial- budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya "*a caring and sharing community*", yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Kerjasama sosial-budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan serta Yayasan ASEAN.

Untuk *ASEAN Community* sendiri sebenarnya belum diratifikasi secra keseluruhan, karena *blue print* yang baru terbuat masih tentang konsep *ASEAN Economic Community*, dan baru poin ini yang diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN, mengingat isu ekonomi adalah isu yang paling urgent pada masa perdagangan bebas di era globalisasi saat ini

Isu perdamaian menjadi sangat mem*booming* pasca-Perang Dunia II di dunia internasional. Kesadaran akan banyaknya kerugian yang dibawa sebagai dampak perang antarpihak atau negara yang sedang bertikai adalah hal yang paling mendasar dalam pemikiran ini. Kesadaran bahwa dibutuhkannya teman sejawat khususnya yang seregion untuk tetap menjaga kestabilan dunia internasional pun sangat mendarah-daging. Karena itu lah sehingga banyak kesepakatan-kesepakatan antarnegara yang terletak di kawasan yang sama untuk mengadakan sebuah organisasi regional yang dapat memudahkan antarnegara anggotanya untuk saling menjaga dan membantu untuk kemajuan diberbagai

bidang, begitu pun di kawasan Asia Tenggara (ASEAN : 2010, www.aseansec.org, diakses pada tanggal 20 Juni 2011).

3.3 Hubungan ASEAN – Timor Leste

Timor Leste terletak di pinggiran Asia Tenggara yang diapit oleh kawasan ASEAN dan Pasifik Selatan. Kecenderungan hubungan politik dan ekonomi serta sejarah masa lalu yang lebih dekat dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara membuat Timor Leste ingin lebih menjalin kerjasama mutualisme yang lebih erat lagi di kawasan tersebut.

Untuk itu, beberapa tahun lalu telah diusahakan oleh pemerintahan Ramos Horta dan Xanana untuk mengajukan aplikasi keanggotan Timor Leste ke dalam ASEAN. Beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia sangat mendukung bergabungnya Timor Leste ke dalam ASEAN. Dengan masuknya Timor Leste menjadi anggota ASEAN,diharapkan bahwa Timor Leste dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam masalah Keamanan terkait Terorisme, Pneyeludupan Manusia Ilegal dan Obat-obatan terlarang.

Timor Leste sangat berkepentingan masuk menjadi anggota ASEAN agar posisi tawar-menawarnya semakin meningkat. Seperti yang diutarakan oleh Xanana Gusmao,”*dengan menjadi anggota ASEAN,Timor Leste ingin mengamankan kepentingan kepentingan politik dan ekonomi negerinya yang kecil dari negara-negara besar disekelilingnya yang mempunyai peluang melakukan invasi. Bila Timor Leste tersebut masuk ASEAN, maka bargaining position Timor*

Leste akan semakin meningkat di Asia Tenggara dan dunia Internasional" (VOI : 2010, www.voi.com,diakses pada tanggal 7 agustus 2010).

Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Timor Leste sebelum bisa menjadi anggota ASEAN. Antara laian :

1. Dibidang Politik, adalah Stabilitas dalam negeri (Jakartaglobe : 2010, www.thejakartaglobe.com, diakses pada tanggal 4 Juli 2011)
2. Dibidang Ekonomi, adalah liberalisasi perdagangan (ASEANSEC : 2006, www.aseansec.org, diakses pada tanggal 4 Juli 2011)

Sejak mengajukan aplikasi di tahun 2006, Timor Leste berusaha secara diplomatis untuk mencari dukungan dari negara-negara ASEAN sambil memenuhi persyaratan yang dinginkan ASEAN.

3.4 Hubungan Australia – ASEAN

Australia merupakan tetangga dekat ASEAN sehingga memiliki kepentingan yang besar dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan dengan ASEAN. Sekalipun Australia tergolong kedalam kawasan Pasifik Selatan, hubungan kerjasama dengan ASEAN terjalin lewat ASEAN Regional Forum (ARF). ARF merupakan pertemuan informal negara-negara ASEAN dengan partnernya, salah satu adalah Asutralia yang berujuan untuk meningkatkan pemahaman antar negara terkait tantangan kawasan yang sedang dihadapi.

Sebagai partner utama ASEAN, Australia telah menandatangani *Free Ttrade Area* bersama Selandia Baru pada 27 februari 2007 guna meningkatkan

profit dari aktivitas ekspor-impor antar ASEAN – Australia. Hubungan ASEAN – Asutralia semakin intens semenjak perang terhadap Teror oleh AS dijadikan sebagai kebijakanluar negeri jangka panjang mereka. Asutralia sebagai sekutu dekat AS berkepentingan mencegah dan membasmi jaringan terrorisme dikawasana Asia Tenggara. Untuk itu, dalam beberapa kesempatan Australia dan ASEAN yang juga mendapat dukungan dari AS bekerjasama dalam memberantas terorisme dikawasan Asia Tenggara.

Hubungan ASEAN – Australia telah berubah dan menjadi lebih baik sejak Australia menjadi Partner Dialog Utama lebih dari dua dekade di tahun 1974. Mulanya, dialog tersebut difokuskan untuk menyiapkan bantuan teknik melalui projek regional, utamanya dalam peneletian dan pembangunan dalam area pangan untuk ASEAN.

Tetapi, ditahun 1980an, dialog tersebut mengalami sebuah perubahan yang signifikan yang lebih menekan dalam tanggung jawab terhadap perubahan yang cepat dalam lingkungan ekonmi ASEAN yang melihat ekspansi hubungan ASEAN – Australia. Isu-isu ekonomi, dalam beberapa kasus berusaha untuk mencari akses ke pasar Australia untuk pertumbuhan ekspor barang-barang manufaktur, menjadi agenda mengemuka dalam hubungan ASEAN – Australia.

Akibatnya, inisiatif yang diambil untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama untuk merefleksikan transformasi ekonomi dan kebutuhan ASEAN dan Australia. Dalam Forum ASEAN – Australia ke 14 pada tahun 1991, keduanya setuju untuk mengekspansi kerjasama sehingga hal itu didasarkan pada kepentingan yang saling menguntungkan dan bermanfaat,meliputi area-area baru

seperi pendidikan, lingkungan, telekomunikasi serta ilmu dan teknologi. Pembangunan ini, diikuti dengan pengikutsertaan dalam isu-isu politik dan keamanan seperti topik diskusi selama Forum ke 15 di tahhun 1993.

Kekuatan kerjasama antara Australia dan ASEAN, disamping keuntungan dihadirkan oleh kedekatan geografi, merupakan bagian karena peningkatan komplementaris hubungan dan dinamisasi ekonomi kawasan. Hal itu juga karena baik keputusan partner untuk melanjutkan kerjasan dan perubahan impelemantasi sesuai dengan kebutuhan dari dua pihak.

3.4.1 K**erangka Kerja Institusi**

ASEAN dan Australia keduanya membagi kepercayaan dan konsultasi yang intens antara pemerintah dan sektor swasta yang secara esensial meningkkatkan kerjasama ekonomi. Pada Forum ke 12, untuk pertama kalinya, Sektor Swasta Australia dan ASEAN dibawah asuhan AABC yang berlangsung dalam beberapa waktu. Untuk memaksimakan partisipasi sektor swasta kedepan dalam Dialog ASEAN – Australia, forum itu secara teratur meninjau ulang usulan dari Ketua AABC selama Forum ke 17 yang mempertimbangkan sektor swasta seperti pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN, dimana partisipasi kelompok berprofil tinggi selalu hadir.

3.4.2 Kerjasama Ekonomi

Hubungan dagang diantara ASEAN dan Australia telah berekspansi secara konstan sejak *Momerandum of Understanding* (MOU) pada kerjasama Perdagangan ASEAN – Australia telah ditandatangani di tahun 1976. ASEAN dan

Australia telah menekankan ekspansi hubungan dagang dan kebutuhan untuk kesenjangan dagang selama PMC dengan Australia di tahun 1989. Selama Forum ke 17, tercatat bahwa ada peningkatan substansial dalam volume dua arah dagang dan investasi sekalipun ASEAN tetap fokus dengan perimbangan dagang. Di tahun 1994, total eksport ASEAN untuk Australia sekkitar 5,4 Juta Dollar AS, sementara total impor ASEAN dari Australia adalah 9,5 Juta Dollar AS, yang menghasilkan surplus perdagangan bagi Australia sebesar 4,1 Juta AS untuk Australia.

Sebagai langkah berikutnya dalam hubungan dagang, Para Menteri Ekonomi ASEAN di Thailand pada September 1994, mengaujukan kemungkinan hubungan atara AFTA dan CER, dengan sebuah pandangan untuk meningkatkan barang-barang komplementaris antara ekonomi ASEAN dan Australia.

3.4.3 Kerjasama Pembangunan

Program kerjasama Ekonomi ASEAN – Australia (PKEAA) sebagai landasan hubungan dialog ASEAN – Australia adalah kolaborasi pertama membangun program diantara ASEAN dan sebuah Partner dialog. Program tersebut meletakkan sebuah mekanisme besar untuk menghubungkan bantuan Australia untuk proyek-proyek ASEAN. Sejak program ini dibentuk di tahun 1974, PKEAA telah berevolusi untuk menjaga jejak dengan kemajuan ekonomi yang signifikan dalam kawasan, sementara diwaktu yang sama memelihara tujuannya dalam memfasilitasi kerjasama ekonomi diantara ASEAN – Australia. *(ASEANSEC : 2009, www.aseansec.org,diakses pada tanggal 4 Juli 2011*)

3.5 Hubungan Australia – Timor Leste

Keterlibatan Australia dalam masalah Timor Timur sudah ada sejak wilayah ini dinyatakan jadi bagian Republik Indonesia. Perang Dingin telah membuka jalan bagi Indonesia untuk menyatukan wilayah yang rusuh dan dinyatakan Fretilin sebagai daerah yang merdeka. Saat itu kecenderungan Fretilin jelas condong ke kubu sosialis sehingga mencemaskan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan Australia.

Masuknya Indonesia ke Timtim memang telah menimbulkan masalah sejak tahun 1975. Restu negara besar karena iklim Perang Dingin mengharuskan soal Timtim segera diselesaikan agar tidak membawa instabilitas kawasan Asia Tenggara. Tidak terpikirkan bahwa berakhirnya Perang Dingin telah membuat Indonesia berada dalam posisi rawan.

Australia jelas berkepentingan agar Timtim ini juga tidak jadi sumber instabilitas kawasan Asia Tenggara yang jadi zona penyangga keamanannya dari serangan utara. Sejak awal Australia memahami alngkah ayng diambil Indonesia untuk menggabungkan kawasan berpenduduk sekitar satu juta itu kedalam negara kesatuan RI. Bahkan secara eksplisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timtim.

Namun demikian sikap Australia itu tidak konsisten. Sejak PM John Howard berkuasa dan terjadinya gejolak reformasi di Indonesia sehingga berada pada posisi lemah dalam tawar menawar diplomatik, Howard mendorong agar Indonesia melepaskan Timtim. Presiden BJ Habibie tak sadar terpengaruh gagasan Howard yang dilontarkan bulan Desember 1998. Habibie pada bulan Januari 1999

menyatakan Timtim akan diberi dua pilihan otonomi luas atau menolaknya sehingga bisa memilih melepaskan diri dari Indonesia.

Kepentingan politik Australia yang paling kentara terhadap Timtim pertama-tama adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timtim pada masa tahun 1970-an itu menjadi ancaman bagi wilayah Australia. Negeri Kangguru menghendaki Timtim stabil sehingga hubungan politik RI-Australia tidak terganggu. Oleh karena itu pada masa awal Australia seperti "memihak" Indonesia dengan mengakui batas-batas wilayah di daerah Timtim. Puncak pengakuan itu adalah disepakatinya pembagian Celah Timor berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua pihak oleh Menlu Ali Alatas dan Menlu Gareth Evans. Secara eksplisit adanya pengaturan batas laut di wilayah yang kaya minyak itu menjadikan Australia negara yang pertama mengakui eksistensi Indonesia atas Timtim.

Namun dengan hadirnya PM John Howard sikap Australia berubah total. Mereka mulai menyatakan bahwa Timtim untuk jangka panjang harus merdeka. Australia mulai mengubah kebijakannya atas Timtim dengan dasar bahwa otonomi luas harus diberikan kepada Timtim sebelum merdeka penuh.

Sikap ini dilandasi oleh kepentingan jangka panjang Australia terhadap Timtim dan Indonesia. Terhadap Timtim, Australia seolah-olah ingin membalas kesalahan masa lalu dengan mengakui eksistensi Indonesia di Timtim yang sampai tahun 1998 tidak diakui PBB. Australia juga menilai dengan pendekatan ke Timtim diharapkan bisa menanamkan pengaruhnya di wilayah berpenduduk 800.000 jiwa ini (Setiawan : 2006, www.globalisasi.com)

Pengaruh Australia di Timtim ini seperti halnya pengaruh Australia di Papua Niugini melebarkan lingkungan pengaruh politiknya yang dianggapnya sudah layak diperbesar. Di tengah krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, posisi Australia sangat menguntungkan. Krisis ekonomi tidak menyebar ke Australia sehingga ketika posisi negara Asia lemah, negeri ini berada dalam kondisi sehat baik militer, politik maupun ekonomi.

Dibalik sikap Australia itu terdapat keinginan menguasai sumber minyak di perbatasan. Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat Australia campur tangan dalam menangani gejolak di Timtim pasca jajak pendapat. Minyak yang dilukiskan sangat besar kandungannya di perbatasan Timtim-Australia merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan negeri Kangguru.

Mudrajad Kuncoro, kandidat PhD University of Melbourne, dalam diskusi 22 Oktober 1999 menjelaskan, keterlibatan Australia tak lepas dari isu klasik *money and power*. Ia menilai, Australia mau membantu Timtim bukan untuk membalas jasa rakyat Timtim yang pernah membantu mencegah invasi ke Australia saat Perang Dunia II, melainkan punya kepentingan bisnis yang dikemas dengan wadah humanis. Mudrajat menulis, “Kalau Australia memang pejuang hak-hak asasi manusia dan humanis tulen, hal pertama yang dilakukan sebelum terjun ke Timtim adalah meminta maaf dan memberi referendum kepada suku Aborigin yang nasibnya mirip dengan suku Indian di Amerika Serikat.

Menurut Mudrajad, kesepakatan Celah Timor (Timor Gap) yang ditandatangani Indonesia-Australia tahun 1989 menyetujui pembagian 62.000 km persegi zona kerja sama menjadi tiga wilayah.

Wilayah *joint development* merupakan wilayah yang berada di tengah dan terbesar dimana kedua negara berhak mengontrol eksplorasi dan produksi migas. Dua zona lainnya dibagi secara tidak merata yang masing-masing negara secara terpisah diberi hak mengatur dan menguasainya. Sampai sekarang dari 41 sumur yang telah dibor di zona kerja sama, sekitar 10 ditemukan cadangan migas. Secara ekonomis, kelayakannya relatif kecil. Namun kandungan gas dan hidrokarbon tidak bisa diabaikan. Sebagai contoh, tulis Mudrajad, di ladang Bayu-Undan, ditaksir punya cadangan minyak 400 juta barel, tiga trilyun kubik gas alam dan 370 juta barel cairan (kondensat dan LPG). Menurut Oil & Gas Joournal edisi 1999, cadangan hidrokarbon ini dinilai paling kaya di luar Timur Tengah dan merupakan ladang minyak terbesar Australia di luar selat Bass.

Menurut Mudrajad, sejumlah perusahaan Amerika, Australia, Belanda sudah aktif di wilayah Celah Timor ini. Di Ladang Bayu-Undan, kerja sama perusahaan AS Phillips Petroleum Co. dan perusahaan tambang Australia, Broken Hill Propietary (BHP Ltd., mencanangkan akan beroperasi penuh mulai tahun 2002. Kabar terakhir, BHP telah menjual sahamnya di Bayu-Undan dan Elang kepada Phillips sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan Australia ini. Saat ini Phillips baru mencari pelanggan atas rencananya membangun jaring pipa gas bawah laut dari Bayu-Undan ke Darwin, wilayah utara Australia (Setiawan : 2006, www.globalisasi.com).

Nick Beams dalam World Socialist Web Site (1999) menyebutkan pula kepentingan Australia akan minyak. Ia menyebutkan awal 1990 kepentingan Portugal bangkit kembali ke Timtim setelah ditemukan cadangan minyak yang nilainya diperkirakan antara 11 sampai 19 milyar dollar AS. Tahun 1991, Portugal mengadukan Australia ke Pengadilan Internasional karena menandatangani perjanjian Celah Timor bulan Desember 1989. Beams mengutip pernyataan Portugal yang menyebutkan, "Perjanjian itu dirancang untuk mendapatkan minyak Timtim yang melebihi kepentingan lainnya.Hanya kerakusan (Australia) seperti itu dapat menjelaskan pengakuan secara de jure aneksasi oleh kekuatan yang memakan korban 100.000 tewas."

Namun Beams juga melihat, perilaku Portugal itu juga dimotivasi oleh ketamakan serupa yang dilakukan Australia terhadap sumber minyak. Portugal lalu berusaha merebut kembali wilayah Timtim yang dikuasai Indonesia dengan mendorong penentuan nasib sendiri rakyat Timtim.

Baik kepentingan politik maupun ekonomi menjadi dasar bagi langkah baru Australia terhadap Timtim. Australia menjadikan isu Timtim menjadi perhatian publik Australia. Dari reaksi rakyat Australia terhadap gejolak di Timtim itu dibenarkan Australia melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mendorong tentaranya masuk Timtim. Sedangkan kepentingan Australia yang berdimensi ekonomi didorong oleh kebutuhan menemukan sumber energi baru. Celah Timor yang sudah dieksplorasi dan diperkirakan mengandung cadangan minyak yang kaya menjadi andalan Australia di masa datang. Oleh karena itu Australia berusaha menyelamatkan kekayaan alam itu dengan memberikan jasa

keamanan di Timor-Timur di bawah payung PBB (Setiawan : 2007, www.polarhome.com, diakses pada tanggal 20 Juni 2011).

3.6 Data Impor Timor Leste (2006 – 2010) dari Australia

Tabel 3.6 Merchandise Import of Major commodities by Australia

HS Code	HS Description	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
27101931	Diesel	216,921	551,362	1,285,723	1,161,514	1,034,500
10061000	Rice in the husk (paddy or rough)	2,053	312,471	6,213	6,591	4,325
27101131	Motor spirit	375,268	384,211	436,900	474,683	495,120
87032300	Vehicles with spark-ignition engine of cylinder capacity 1500-3000cc	512,861	1,432,650	2,953,469	8,728,399	6,245,320
7082000	Beans, fresh or chilled	-	241	681	2,393	3,478
27101921	Jet fuel	1,673,553	1,694,238	1,889,487	1,555,363	1,368,714
85175000	Apparatus for carrier-current line systems or for digital line systems, nes	13,150	34,687	70,375	147,880	125,674
24022000	Cigarettes containing tobacco	141,892	124,398	98,375	97,307	98,227
25232900	Portland cement (excl. white)	438	4,982	9,210	8,298	8,012
87089900	Parts and accessories, nes, for vehicles of 87.01 to 87.05	299,043	687,422	897,849	1,488,255	1,288,325
30032000	Medicaments of other antibiotics, not for retail sale	17,896	54,371	100,526	396,361	401,365
85291000	Aerials and aerial reflectors of all kinds and parts thereof	353,089	264,100	162,726	35,525	30,147
87019000	Tractors (excl. tractors of 87.09), nes	58,163	87,255	111,033	225,072	228,122
90189000	Instruments and apparatus, nes, for medical, surgical... sciences	12,710	187,225	232,082	151,000	110,325
19021900	Uncooked pasta, not containing eggs, not stuffed	362	1,642	4,408	675	512
48189000	Household, sanitary or hospital articles of paper..., etc, nes	95,068	41,665	7,259	34,906	20,145
83024100	Mountings, fittings, etc, for buildings, of base metal, nes	34,516	87,910	157,086	220,408	126,877
15111000	Crude palm oil	-	-	-	187	247
84711000	Analogue or hybrid automatic data processing machines	254,713	374,588	456,553	349,071	298,410
94060000	Prefabricated buildings	754	11,875	26,332	-	1,658
Total		**4,062,450**	**6,337,293**	**8,906,287**	**15,083,888**	**11,889,503**

(Sumber : Kementrian Keuangan Republik Demokratik Timor Leste)